

**INOVASI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN GOWA**

Disusun dan Diusulkan Oleh
HUSNUL ISTIQAMAH
Nomor Stambuk : 105640164412



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

**INOVASI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN GOWA**

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh
Husnul Istiqamah
Nomor Stambuk : 105640164412

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

PERSETUJUAN

Judul : Inovasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Husnul Istiqamah

Nomor Stambuk : 105640164412

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

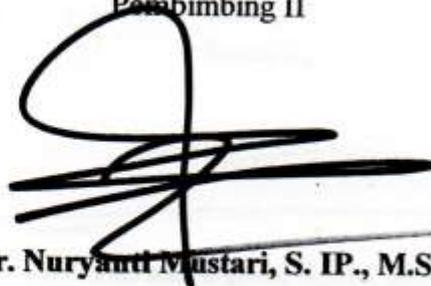
Menyetujui:

Pembimbing I



Drs. Alimuddin Said, M.Pd

Pembimbing II



Dr. Nuryanti Mustari, S. IP., M.Si

Mengetahui:

Dekan Fisipol Unismuh Makassar



Ir. H. Saleh Molla, MM

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



A. Luhur Prianto, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1184/FSP/A.1-VIII/VIII/38/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu 26 Agustus 2017.

TIM PENILAI

Ketua,



Ir. H. Saleh Molla, MM

Sekretaris,



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

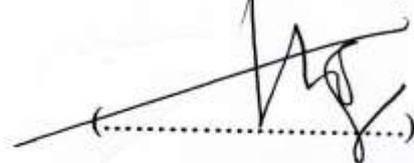
Penguji:

1. Drs. Alimuddin Said, M.Pd



(.....)

2. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM



(.....)

3. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si



(.....)

4. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Husnul Istiqamah

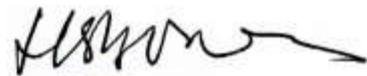
Nomor Stambuk : 105640164412

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain atau ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, September 2017

Yang Menyatakan,



Husnul Istiqamah

ABSTRAK

HUSNUL ISTIQAMAH, 2017, Inovasi Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Gowa (Dibimbing oleh Alimuddin Said dan Nuryanti Mustari)

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui inovasi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana penulis ingin menggambarkan mengenai inovasi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam bidang peningkatan profesionalisme guru di Kabupaten Gowa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumen. Analisis data primer berupa hasil wawancara dan observasi dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam bentuk reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan proses siklus serta pengambilan kesimpulan akhir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Gowa dalam berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Dalam meningkatkan mutu pendidikan dilakukan inovasi baru dalam peningkatan profesionalisme guru. Pemanfaatan media pembelajaran secara efektif berbasis teknologi, Pembuatan Rencana Pengembangan Sekolah, serta pemberian bimbingan belajar bagi peserta didik di luar jam pelajaran adalah upaya peningkatan profesionalisme guru yang ada di Kabupaten Gowa dalam mencapai tujuan pendidikan yang bermutu.

Kata Kunci : Inovasi, Pemerintah, Pendidikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas izin dan petunjuk Allah SWT, yang selalu Dia curahkan kepada hamba-Nya tanpa henti, serta shalawat tidak lupa pula kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang berkat perjuangan beliau maka kita bisa mengenal agama Islam yang diridhoi oleh Allah SWT. Dengan segala waktu dan kesehatan yang diberikan oleh Allah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menuliskan hasil penelitian ini dalam suatu karya ilmiah, yaitu skripsi.

Skripsi yang berjudul **“Inovasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Gowa”** Pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama penulisan ini, penulis mengalami berbagai rintangan dan hambatan yang silih berganti. Namun, berkat motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun materil sehingga semua rintangan dan hambatan dapat teratasi, Alhamdulillah.

Oleh karena itu pula, pada kesempatan yang berharga ini penulis secara khusus menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Mohammad Syarif dan Ibunda tercinta Bintoenng atas segala pengorbanan dan do'a yang tulus yang tanpa henti diberikannya. Semoga apa yang telah diberikan keduanya kepada penulis menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan kasih sayang dari Allah di dunia dan di akhirat.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. Alimuddin Said, M.Pd., selaku pembimbing I, dan Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si., selaku pembimbing II yang tidak ada henti-hentinya membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abd. Rahman Rahim SE, MM.
3. Bapak Ir. H. Saleh Molla, MM selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Terima kasih pula pada seluruh sahabat-sahabat yang telah membantu penulis selama penyelesaian skripsi ini, terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga semua yang dilakukan kepada penulis bernilai amal kebaikan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun, agar ke depannya penulis mampu menuliskan karya ilmiah yang lebih baik. Semoga setiap apa kita lakukan diridhoi oleh Allah SWT, Amiin ya Robbal 'Alamiin.

Makassar, September 2017

Husnul Istiqamah

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Sambutan Tim	iii
Halaman Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
Bab II Tinjauan Pustaka	7
A. Teori Inovasi	7
B. Teori Pemerintah.....	13
C. Teori Pendidikan	15
1. Arah Pendidikan	18
2. Makna Kebijakan Publik Bidang Pendidikan	19
3. Inovasi Pendidikan.....	22
4. Mutu Pendidikan	33
D. Konsep Profesionalisme Guru.....	36
E. Kerangka Pikir	39
F. Fokus Penelitian	40
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	40
Bab III Metode Penelitian	42
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	42
B. Jenis Penelitian.....	42
C. Sumber Data.....	43
D. Informan Penelitian.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Keabsahan Data.....	45
Bab IV Deskripsi Obyek Penelitian	47
A. Profil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa	
1. Profil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa	47
2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa	47

B. Inovasi Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Gowa dalam Peningkatan Profesionalisme Guru	49
1. Pemanfaatan Media Pembelajaran Secara Efektif	51
2. Penyusunan RPS (Rencana Pengembangan Sekolah) oleh Guru	54
3. Pemberian Bimbingan Belajar Peserta Didik	58
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Gowa dalam Peningkatan Profesionalisme Guru.....	60
1. Faktor Pendukung Inovasi Pemerintah dalam Peningkatan Profesionalisme Guru.....	60
2. Faktor Penghambat Inovasi Pemerintah dalam Peningkatan Profesionalisme Guru	65
Bab V Kesimpulan Dan Saran	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68

DAFTAR TABEL

Daftar	Judul Tabel	Halaman
Tabel I	: Kebijakan Dilihat Dari Kemampuan Masyarakat.....	20
Tabel II	: Daftar Informan	43
Tabel III	: Rekapitulasi Jumlah Guru di Kabupaten Gowa.....	57

DAFTAR GAMBAR

Daftar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	: Kerangka Pikir	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan maju mundurnya serta kejayaannya suatu bangsa. Bangsa yang mampu menata pendidikan dengan baik mempunyai harapan besar dapat meraih kejayaannya. Kualitas suatu generasi ditentukan oleh sistem pendidikannya. Sistem yang baik menghasilkan generasi yang berkualitas, sebaliknya sistem pendidikan yang tidak efektif akan menghasilkan generasi yang tidak mempunyai daya saing. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas diperlukan manajemen pendidikan yang dapat memobilisasi segala sumber daya pendidikan (Sanusi: 2014)

Pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang masa sebagai bentuk tuntutan dari perkembangan zaman yang semakin hari membutuhkan dinamisasi pemikiran untuk menangani masalah-masalah global yang kini banyak dialami oleh masyarakat. Keterbelakangan pendidikan seringkali menjadi hambatan serius dalam proses pembangunan Negara. Menurut Saroni (2013: 245) mengatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan panduan dari tingkat nasional, selanjutnya diterjemahkan pada tingkat daerah dan akhirnya satuan tingkat pendidikan, menerapkannya sebagai objek pembelajaran.

Hal yang perlu diperhatikan bahwasanya pendidikan mau tidak mau

harus terus ditingkatkan mutu dan kualitasnya karena bagaimanapun juga pendidikan juga merupakan tolak ukur keberhasilan suatu bangsa untuk mencapai kehidupan bernegara yang lebih baik.

Pendidikan yang sebenarnya diselenggarakan untuk memberikan pencerahan dan sekaligus perubahan signifikan pada generasi muda. Pencerahan ini perlu dilakukan sebagai suatu usaha sadar untuk mempersiapkan generasi bangsa ini menyongsong kehidupan yang akan datang di masa depan.

Kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya pendidikan tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (9) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia. Jabaran tujuan pendidikan Indonesia tersebut dituangkan di dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu dan mandiri”.

Pelayanan pendidikan kita masih berorientasi pada filosofi *pedagogy of the oppressed* yang memaksakan dan menekan. Kebebasan peserta didik mengembangkan kepribadiannya sebagaimana yang dianjurkan oleh filosofi humanism yang juga menempatkan peserta didik sebagai subjek dalam pendidikan masih belum tampak.

Inovasi pendidikan telah banyak dilakukan demi mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Banyaknya inovasi yang lahir dan dihadirkan banyak atau tidaknya telah mampu mengubah wajah pendidikan kita. Strategi-strategi baru yang dihadirkan harus mampu mendorong kualitas pendidikan kita ke arah yang lebih baik karena tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan adalah sesuatu yang mendesak. Bahkan harus diakui bahwa pendidikan adalah kebutuhan yang primer, apalagi jika didasarkan pada konsep dasar bahwa mengikuti pendidikan adalah hak sekaligus kewajiban bagi setiap warga Negara, jelas bagi kita betapa pentingnya pendidikan. Dengan pendidikan yang proporsional, kita dapat melakukan banyak hal yang berguna dan selanjutnya dapat melakukan perubahan atas kondisi kehidupan kita (Saroni: 2013).

Begitu pentingnya masalah pendidikan sehingga proses tersebut diselenggarakan diberbagai tempat, bahkan ditempat-tempat yang sulit terjangkau. Ini merupakan upaya untuk melakukan perubahan kondisi dan kualitas hidup masyarakat. Kehidupan masyarakat dengan keterbelakangan pendidikan tidak boleh dibiarkan terjadi terus menerus. Harus dilakukan

perubahan dan pengkondisian agar terjadi peningkatan pada kualitas hidup masyarakat. Semakin lama hal tersebut dibiarkan, maka selama itu pula kualitas bangsa ini masih jauh dari harapan bersama.

Disebabkan begitu pentingnya pendidikan demi kualitas hidup yang lebih baik, maka sejalan dengan itu pula harus diselenggarakan pendidikan yang benar-benar bermutu tinggi. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Karena dalam UUD jelaslah dikatakan bahwa mengikuti pendidikan adalah hak sekaligus kewajiban bagi seluruh warga negara. Ini merupakan langkah antisipatif demi kualitas intelektualitas dan keterampilan yang disiapkan oleh pemerintah untuk warga negaranya. Karena sebagaimana diketahui bahwa dengan kualitas intelektualitas dan keterampilan yang tinggi, warga negaranya mampu bersaing dengan warga Negara bangsa lain.

Perubahan kehidupan masa depan dengan pendidikan memang merupakan langkah konkret untuk mempersiapkan para generasi bangsa. Pendidikan diharapkan mampu memberikan perubahan pola pikir mereka bahwa kehidupan membutuhkan perubahan-perubahan.

Masalah pendidikan adalah masalah yang kompleks, maka diperlukan inovasi-inovasi yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari masalah pendidikan adalah masalah guru. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh karena itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi para siswanya dan memperbaiki kualitas

mengajarnya. Hal ini menuntut perubahan-perubahan dalam pengorganisasian kelas, penggunaan metode belajar, serta strategi belajar mengajar.

Untuk mencapai mutu pendidikan yang sesuai dengan yang diinginkan maka pemerintah harus meningkatkan profesionalisme guru. Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam menangani masalah pendidikan juga berfokus pada hal tersebut di atas, dimana peningkatan mutu pendidikan harus sangat memperhatikan masalah profesionalisme guru. Guru yang profesional harus mampu menciptakan kondisi belajar yang kondusif.

Dalam hal pendidikan, masalah pendidikan yang ada di Kabupaten Gowa tidak terlepas dari permasalahan profesionalisme guru. Guru seringkali mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya saat proses belajar mengajar sedang berlangsung.

Sebagaimana yang penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan di atas dengan judul “Inovasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Gowa”

B. Rumusan Masalah

Selanjutnya, untuk dapat mengarahkan pembahasan sebagai suatu karya ilmiah dan untuk menghindari kekaburan pengertian dari obyek tertentu, maka penulis menyajikan judul tersebut ke dalam beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana inovasi pemerintah di Kabupaten Gowa dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kabupaten Gowa?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam

peningkatan profesionalisme guru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berikut ini adalah langkah lanjutan dari perumusan masalah sebagai langkah-langkah konkrit menuju pemecahan masalah penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui inovasi pemerintah di Kabupaten Gowa dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kabupaten Gowa?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat inovasi pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa manfaat baik sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dalam disiplin ilmu pemerintahan tentang bagaimana inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Gowa.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk menyusun suatu kebijakan baru dalam kaitannya dalam bidang pendidikan

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Teori Inovasi

Secara umum pengertian inovasi adalah melakukan proses pembaruan, pemanfaatan, pengembangan dengan menciptakan hal baru yang berbeda dengan sebelumnya. Setiap organisasi perlu mengembangkan kemampuan inovasi dan kinerja inovatif dalam menghadapi persaingan dan perubahan yang sangat cepat, karena inovasi merupakan cara yang tepat dalam menghadapi perubahan dan persaingan. Dengan demikian, baik dalam tataran individu maupun organisasi diperlukan sikap dan kinerja inovatif dalam menghadapi perubahan dan persaingan yang makin ketat. Sikap konservatif terhadap perubahan serta tidak adanya menciptakan kondisi kondusif bagi inovasi jelas akan berakibat yang tidak baik bagi keberlangsungan organisasi. Kreativitas dan inovasi akan menjadikan suatu organisasi akan berbeda dengan yang lainnya, dan perbedaan ini jelas akan menjadikan organisasi berada pada posisi persaingan yang lebih baik. Oleh karena itu, inovasi dan sikap inovatif menjadi suatu kebutuhan dalam konteks kehidupan organisasi dewasa ini.

Sebuah inovasi adalah suatu ide yang baru yang mampu membuat suatu perubahan yang progresif. Dari beberapa pengertian inovasi tampak bahwa tidak terdapat perbedaan yang esensial dalam pemaknaan inovasi, namun lebih bersifat saling melengkapi dan menambah cakupan pengertian

sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih luas. Apabila disimpulkan, pokok-pokok pikiran dari pengertian di atas adalah :

1. Inovasi merupakan penerapan hal-hal yang baru dalam suatu pelaksanaan tugas sebagai penerapan pengetahuan
2. Hal-hal baru dalam inovasi dapat berupa ide, praktek, proses, pelayanan, ideologi ataupun strategi bisnis
3. Inovasi merupakan suatu perubahan dan atau berimplikasi perubahan sebagai akibat dari penerapan hal-hal yang baru.

Dalam konteks organisasi, penerapan hal baru dalam berbagai bentuknya akan berimplikasi pada perubahan dalam bentuk ide, praktik, ataupun objek/benda tertentu yang dianggap baru oleh seseorang atau oleh kesatuan/kelompok yang mengadopsi. Dengan demikian, inovasi tidak harus sesuatu yang benar-benar baru secara objektif, namun pandangan subjek yang menganggap sesuatu itu baru merupakan ide dasar dari konsep inovasi. Penerapan sesuatu yang baru, baik ide, praktik maupun objek akan menjadikan sesuatu itu berbeda dengan yang ada pada saat itu atau dengan apa yang ada sebelumnya, dan ini menunjukkan bahwa telah terjadi suatu perubahan. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa perubahan merupakan konsekuensi dari adanya inovasi (atau inovasi itu sendiri merupakan suatu perubahan), ini berarti bahwa tanpa sikap terbuka pada perubahan, maka akan sangat sulit atau bahkan tidak mungkin seseorang atau kelompok orang untuk mau menerima inovasi. Inovasi berarti mengenalkan hal yang baru, baik produk, ide, objek maupun metode yang akan berdampak pada perubahan.

Perubahan terjadi akibat diperkenalkan dan diterapkannya sesuatu yang baru, dengan kebaruan terjadi penyesuaian-penyesuaian dalam interaksi sehingga akan mendorong pada perubahan dalam interaksi tersebut. Inovasi merupakan suatu perwujudan dari ide kreatif dalam upaya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan di masa depan, dan hal itu mendorong pada perubahan kinerja dalam dimensinya yang baru. Sebagai suatu bentuk perwujudan kreativitas, inovasi dapat dipahami sebagai suatu hal yang mempunyai kaitan dengan kondisi, baik kondisi individu maupun organisasi. Kondisi-kondisi ini dapat menjadi sumber kemunculan suatu inovasi, dan dilihat dari keseluruhan prosesnya hal tersebut dapat menggambarkan suatu tahapan, dari tahap individu kemudian berkembang ke tahapan organisasi. Inovasi merupakan suatu hasil kreativitas individu, baik ide barunya berasal dari diri sendiri maupun dari luar, yang kemudian diterapkan dalam konteks lingkungan tertentu seperti lingkungan organisasi. Inovasi merupakan dimensi individual dan organisasional, artinya di samping kompetensi individu, juga diperlukan kondusivitas organisasi yang akan membawa pada tumbuh dan berkembangnya suatu inovasi. Inovasi dihasilkan oleh interaksi antara pengaruh struktural dengan perilaku individu. Inovasi dibedakan menjadi dua, yakni ;

1. Inovasi yang terjadi dengan sengaja (*invention*): inovasi jenis ini adalah proses munculnya suatu hal baru dari kombinasi hal-hal lama yang telah ada.
2. Inovasi yang terjadi tanpa disengaja (*discovery*): inovasi *discovery* adalah

penemuan hal baru, baik berupa alat ataupun gagasan. Inovasi jenis ini menjadi *invention* ketika masyarakat mengakui dan dapat memanfaatkan hasil inovasi tersebut.

Beberapa kelompok orang akan mengadopsi sebuah inovasi segera setelah mereka mendengar inovasi tersebut. Sedangkan beberapa kelompok masyarakat lainnya membutuhkan waktu lama untuk kemudian mengadopsi inovasi tersebut. Menurut Rogers (1981), pengertian inovasi adalah gagasan, ide, rencana, praktek atau benda yang diterima dan disadari sebagai hal yang baru dari seseorang atau kelompok untuk diimplementasikan atau diadopsi.

Program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa, namun inovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Ada beberapa sumber yang bisa mendorong terjadinya sebuah inovasi. Sumber-sumber tersebut yakni:

1. Perbedaan (*gap*) antara permintaan (*demand*) & penawaran (*supply*)
2. Menciptakan permintaan karena kecenderungan
3. Perubahan (*change*)
4. Masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang lama
5. Inovasi yang ditujukan untuk mengganti inovasi yang lama.

Inovasi merupakan proses kreatif yang membutuhkan waktu yang

cukup lama. Semua inovasi yang menjadi populer & waktunya lama serta digunakan oleh masyarakat banyak akan menjadi sebuah tradisi. Inovasi memiliki arti yang lebih luas dari penemuan. Bila dilihat dari proses dan pembentukannya maka inovasi mencakup bidang yang bebas serta masuk dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan penemuan yang hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu saja.

Faktor penentu inovasi dapat berupa faktor individual, faktor organisasional, dan faktor lingkungan. Inovasi merupakan suatu proses sejak tahap uji coba, implementasi, sampai komersialisasi. Pada tahap uji coba meliputi pengumpulan informasi dan evaluasi sumberdaya yang mendorong keputusan untuk melakukan inovasi. Tahap implementasi berkaitan dengan proses eksploitasi dan komersialisasi ide dalam organisasi.

Menurut Sanusi (2013:99) mengatakan bahwa Sebuah gagasan tidak pernah awet, meski gagasan itu menawarkan sesuatu yang baru dan terus dikembangkan. Manakala satu gagasan yang penting yang bisa ditawarkan pada orang lain, tentu saja akan dibutuhkan orang lain yang mau menerima gagasan itu. Saat menyampaikan gagasan, tentu akan ada orang yang bias menerima gagasan itu dan adapula orang yang akan menolak dan mengabaikannya. Karena itu, penting untuk bisa menjual gagasan tersebut.

Menurut Fullan (1991: 48) ada beberapa fase dalam proses perubahan (inovasi) yaitu:

1. Inisiasi

Proses inisiasi dalam pembaharuan menurut Fullan dilakukan

dengan mempertimbangkan faktor-faktor relevansi, kesiapan, dan ketersediaan sumber-sumber. Pertimbangan relevansi terkait dengan interaksi kebutuhan dan kejelasan inovasi atau apa sesungguhnya yang harus ditawarkan kepada sasaran inovasi. Kesiapan mencakup keterlibatan baik secara konseptual atau praktis dari sasaran inovasi untuk memulai mengembangkan atau mengadopsi inovasi yang diberikan. Sedangkan ketersediaan sumber-sumber berkenaan dengan akumulasi dan ketentuan atau syarat dukungan sebagai bagian dari proses pembaruan.

2. Implementasi

Pada tahap ini, sebuah inovasi dicoba untuk dipraktekkan akan tetapi sebuah inovasi membawa sesuatu yang baru apabila tingkat ketidakpastiannya akan terlibat dalam tingkat difusi. Ketidakpastian dari hasil-hasil inovasi ini masih akan menjadi masalah pada tahapan ini. Maka sasaran inovasi akan memerlukan bantuan teknis dari agen perubahan untuk mengurangi akibat ketidakpastian dari akibatnya. Permasalahan penerapan inovasi akan lebih serius terjadi apabila yang mengadopsi inovasi itu adalah suatu organisasi, karena dalam sebuah inovasi jumlah individu yang terlibat dalam proses keputusan inovasi ini akan lebih banyak dan terdiri dari beberapa karakter yang berbeda-beda. Penemuan kembali biasanya terjadi pada tahap ini, maka tahap ini merupakan tahap yang sangat penting. Penemuan kembali ini adalah tingkatan di mana sebuah inovasi diubah atau dimodifikasi oleh pengguna dalam proses adopsi atau implementasinya. Dalam konteks implementasi ini,

pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan memberikan tekanan pada proses. Esensinya implementasi adalah proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer idea tau gagasan, program atau harapan yang didesain dalam sebuah model tertentu. Kata proses dalam tahapan implementasi ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, Mendeskripsikan sumber-sumber baru dan mendemonstrasikan metode-metode yang digunakan. Dalam tahap ini sering ditemukan kendala dimana beberapa pihak tidak setuju akan inovasi yang dibuat. Orang-orang diluar sistem melakukan sesuatu yang berlawanan, melakukan sabotase atau mencoba mencegah upaya untuk mengubah praktek yang berlaku. Penolakan ini mungkin dilakukan secara terbuka dan aktif atau secara tersembunyi dan pasif. Hal tersebut disebut sebagai penolakan terhadap perubahan.

3. Kontinuasi/Kelanjutan

Pada tahap ini inovasi dikembangkan secara berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan agar proses yang ada berjalan secara efektif. Proses ini merupakan tahap kebalikan dari *discontinuance* yaitu tahap dimana inovasi ditolak. Pada tahap *continuation* inovasi diadopsi selama beberapa waktu tertentu. Pada tahap ini inovasi dianggap memiliki dampak positif tertentu atau memenuhi syarat dari tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat inovasi (*innovator*).

B. Teori Pemerintah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemerintah memiliki

arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelolah dan menetapkan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah juga dapat berarti organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang di kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan suatu negara. Dengan memperhatikan hal di atas, hakikat pemerintah dipersamakan dengan arti kekuasaan. Salah satu pendukungnya adalah John Locke dalam bukunya "*Two Treaties On Civil Government*" yang mengartikan kekuasaan sebagai berikut :

1. Kekuasaan dalam bidang legislatif yaitu kekuasaan dalam pembuatan Undang-undang.
2. Kekuasaan dalam bidang eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan atau menjalankan Undang-undang.
3. Kekuasaan dalam bidang federatif adalah kekuasaan dalam hubungan antar negara, perjanjian atau perserikatan atau orang-orang, lembaga, ataupun negara lain.

Namun pendapat yang berbeda dari Montesqueieu yang merumuskan 3 hal tentang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, serta kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif menurutnya adalah kekuasaan untuk menjaga agar Undang-undang dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya

sesuai dengan tujuannya.

C. Teori Pendidikan

Pada dasarnya pengertian pendidikan (UU SISDIKNAS NO. 20 Pasal 1 ayat 1) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan sebagian dari kehidupan masyarakat dan juga dinamisator masyarakat itu sendiri. Sektor pendidikan selalu terbelakang dalam berbagai sektor pembangunan lainnya, bukan hanya karena sektor itu lebih dilihat sebagai sektor konsumtif, juga karena *'by definition'* pendidikan adalah status quo masyarakat (Tilaar, 2012: 80) dalam aspek ini peranan pendidikan memang sangat strategis karena menjadi tiang sanggah dari kesinambungan masyarakat itu sendiri. Bayangkan betapa runyamnya kehidupan ini apabila tidak ada dasar pijakan.

Masyarakat akan terus berubah dan membawa nilai-nilai baru. Ada yang sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku, tetapi banyak yang justru berlawanan. Apalagi kehidupan manusia dewasa ini telah mengglobal sehingga tidak bisa mengelak dari perubahan-perubahan di dunia. Dunia pendidikan biasanya tidak siap dalam menghadapi kemungkinan perubahan-perubahan itu. SISDIKNAS sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan nasional seyogyanya sensitif terhadap gerak perubahan itu agar

dapat menyiapkan generasi muda tanggap dan dapat ikut mengarahkan dinamika perubahan masyarakat tersebut. Jika ditelaah konsep dasar yang diterapkan dalam proses pendidikan dan latar penyelenggaraannya, semua proses diarahkan untuk memberikan fasilitas secara menyeluruh bagi masyarakat. Tidak ada diskriminasi dalam proses pendidikan di negeri ini. Artinya, setiap warga negara mempunyai hak yang sama, bahkan pendidikan tidak hanya dijadikan sebagian hak tetapi juga kewajiban. Setiap warga negara berkewajiban untuk mengikuti proses pendidikan. Kesadaran untuk menjadikan proses pendidikan sebagai sebuah kewajiban adalah bentuk kepedulian atas peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia paling berharga adalah generasi muda. Dalam kegiatan masyarakat atau bernegara, tenaga yang ada didalam diri mereka merupakan tenaga pengubah dan tenaga pengkondisian yang terbaik. Oleh karena itulah, generasi muda harus diikutsertakan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Dengan cara demikian, terbukalah pemikiran mereka mengenai segala upaya perbaikan kondisi masyarakat.

Pendidikan dapat digolongkan sebagai hak dasar setiap orang. Peningkaran terhadap kondisi ini merupakan pelanggaran yang sangat serius. Itulah sebabnya dalam proses pendidikan tidak boleh ada diskriminasi pelayanan. Kita sangat menyadari bahwa bangsa dan negara kita masih termasuk kelompok negara sedang berkembang, walaupun ada yang mengatakan sudah sampai pada taraf negara berkembang. Kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita masih dalam proses berkembang atau

sedang berproses. Oleh Karena itulah, aspek pendidikan masih merupakan bidang garapan utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Selanjutnya, proses pendidikan tersebut harus menyeluruh untuk setiap elemen masyarakat, tidak ada undur pilih-pilih dalam memberikan kesempatan mengikuti proses pendidikan. Setiap anak usia sekolah harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti proses pendidikan dalam pembelajaran.

Diskriminasi dalam kesempatan mengikuti proses pendidikan masih terjadi di negara ini. Akibatnya, masih banyak anak-anak usia sekolah yang tidak dapat mengikuti proses pendidikan sebab terjaring oleh kelambu diskriminasi tersebut. Pendidikan adalah sesuatu yang sangat universal (Saroni: 63) setiap orang berhak untuk mengikutinya. Tidak ada larangan bagi setiap orang untuk mengikuti proses pendidikan, di tempat manapun. Sekolah sebagai institusi penyelenggara proses pendidikan harus menerima anak tersebut. Jika ternyata diskriminasi kesempatan karena kondisi perekonomian keluarga yang kurang menguntungkan, hal tersebut merupakan penindasan atas warga Negara.

Oleh karena itulah, pendidikan seharusnya diberikan kepada lapisan masyarakat dengan berdasar pada kenyataan bahwa pendidikan itu universal. Setiap orang berhak dan berkewajiban untuk mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran, bahkan tidak terbatas pada usia berapapun. Pendidikan itu universal atas usia dan kondisi setiap orang. Tidak ada pembatasan atas kondisi perekonomian ataupun usia peserta didik. Ketika seseorang telah berusia lanjut pun jika masih berkeinginan untuk mengikuti proses

pendidikan, masih sah saja untuk belajar sebab pendidikan itu seumur hidup.

1. Arah Pendidikan

Pendidikan diarahkan dalam upaya untuk hal-hal berikut ini:

a. Pengembangan Manusia Sebagai Makhluk Individu

Pendidikan berusaha mengembangkan anak didik menjadi mandiri. Pendidikan memberikan bantuan agar anak mampu menolong dirinya sendiri, oleh karena itu mereka diberikan pengalaman di dalam berbagai hal seperti konsep, inisiatif, kreatifitas, kehendak, emosi/perasaan, tanggung jawab, serta keterampilan.

b. Pengembangan Manusia Sebagai Makhluk Sosial

Di samping sebagai makhluk individu, manusia juga makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Melalui pendidikan dapat dikembangkan suatu keadaan yang seimbang antara anggota individu dan sosial manusia.

c. Pengembangan manusia sebagai makhluk susila (ahlak mulia)

Hanya manusia yang mampu menetapkan tingkah laku mana yang baik dan mana yang tidak baik. Melalui pendidikan dikembangkan manusia susila. Anak didik diusahakan agar mendukung norma dan nilai-nilai susila serta sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Hal ini akan bermanfaat bagi kepentingan dirinya sebagai individu dan untuk kepentingan kehidupan masyarakat.

d. Pengembangan manusia sebagai makhluk beragama (imtaq)

Setiap orang dituntut untuk menghayati dan mengamalkan

ajaran agama yang dianutnya dengan sebaik-baiknya. Pendidikan diusahakan membekali anak didik memahami agama yang dianutnya dan mengamalkannya sesuai dengan tuntunan syariat agama.

e. Pengembangan manusia sebagai makhluk profesi

Manusia dituntut untuk dapat hidup dengan memiliki keahlian. Pendidikan diusahakan untuk membekali anak didik dengan berbagai keahlian yang dapat dijadikan bekal hidupnya dan menjadi lebih bermartabat.

2. Makna Kebijakan Publik Bidang Pendidikan

Kebijakan publik menurut Winarno (2005: 17) adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor, bukan pemerintah. Pengertian di atas menunjukkan hal-hal berikut:

- a. Kebijakan publik tidak semata-mata didominasi oleh kepentingan pemerintah
- b. Aktor-aktor itu di luar pemerintah harus diperhatikan aspirasinya
- c. Faktor-faktor yang berpengaruh harus dikaji sebelumnya.

Tiga hal tersebut menjadi keniscayaan karena dengan berkembangnya informasi yang sangat cepat akibat proses globalisasi menjadikan masyarakat semakin kritis. Kekritisannya itu akan membawa pada titik persoalan ketika sektor di luar negara tidak dilibatkan sejak awal, menjadikan kebijakan mengalami kontra produktif.

Pengertian yang berbeda dapat dilihat dari Dye (1981 :2) yang

mendefinisikan kebijakan publik sebagai *whatever government choose to do or not to do*. Maksudnya adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Titik tekan pendapat ini adalah kebijakan tidak hanya rumusan kebijakan di atas kertas saja, tetapi pilihan tindakan yang akan diambil oleh pemerintah, baik dilakukan maupun tidak dilakukan tanpa dipengaruhi oleh pihak non-pemerintah.

Dua pengertian di atas bertolak belakang karena pendapat pertama sangat memerhatikan pihak di luar pemerintah, sedangkan pendapat kedua sangat mengabaikan dari sektor diluar pemerintah, seperti masyarakat yang secara langsung mendapatkan dampak langsung dari kebijakan. Akan tetapi, pendapat kedua menggarisbawahi tentang “memilih dan tidak memilih tindakan” harus dipahami dalam kerangka di bawah ini :

Tabel I :Kebijakan Dilihat Dari Kegiatan dan Kemampuan Masyarakat

	Kegiatan Strategis	Kegiatan Tidak/ Kurang Strategis
Masyarakat mampu melaksanakan	I (Pemerintah dengan masyarakat)	II (Masyarakat)
Masyarakat tidak mampu untuk melaksanakan	III Pemerintah	IV Pemerintah (dibiarkan)

Kebijakan pendidikan menurut Nugroho (2003:54) dilihat dari empat kuadran tersebut termasuk dalam kuadran I sehingga diperlukan partisipasi aktif sektor di luar pemerintah. Argumentasi yang biasa dibangun bahwa pendidikan sebenarnya biasa dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi pemerintah menganggap bahwa pendidikan merupakan

kegiatan strategis bagi perkembangan sebuah negara karena penentu kualitas sebuah bangsa terletak pada tingkat pendidikan yang dicapai penduduknya. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa lepas tangan. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah meliputi perencanaan, pembuatan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakannya.

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan publik bidang pendidikan dapat didefinisikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Kebijakan publik bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan profesionalitas staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung atas pendidikan (Alisyahbana: 2000)

Kebijakan pendidikan termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan dalam pembuatannya melalui tahapan yang panjang. Winarno (2005) maupun Dunn (2003) membaginya menjadi lima tahapan yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Lima tahap ini kalau mendasarkan pada defenisi di atas harus memperhatikan tiga hal pokok, yaitu pemerintah, aktor-aktor di luar pemerintah (kelompok kepentingan dan kelompok penekan), serta faktor-faktor selain manusia yang akan maupun telah mempengaruhi kebijakan.

Kebijakan pendidikan memiliki empat dimensi pokok, yaitu dimensi normatif, struktural, konstituentif, dan teknis. Dimensi normatif ternilai atas nilai, standar, dan filsafat. Dimensi ini memaksa masyarakat untuk melakukan peningkatan dan perubahan melalui kebijakan pendidikan yang ada. Dimensi tersebut perlu dukungan dari dimensi struktural. Dimensi ini berkaitan dengan ukuran pemerintah (desentralisasi, sentralisasi, federal), dan satu struktur organisasi, metode, dan prosedur yang menegaskan dan mendukung kebijakan bidang pendidikan. Dimensi konstituentif terdiri dari individu, kelompok kepentingan, dan penerima dan yang menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Dimensi teknis menggabungkan pengembangan, praktek, implementasi, dan penilaian dari pembuatan kebijakan pendidikan.

3. Inovasi Pendidikan

Reformasi pendidikan telah dilakukan, dan regulasi atas perubahan kebijakan pembangunan pendidikan nasional telah dimulai. Untuk itu, seluruh kebijakan yang terkait dengan perubahan, atau pembaharuan, penyempurnaan, dan pengembangan program pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu, sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan.

Inovasi pendidikan adalah usaha mengadakan perubahan dengan tujuan untuk memperoleh hal yang lebih baik dalam bidang pendidikan.

Pendidikan adalah suatu sistem, maka inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang lain, maupun sistem pendidikan dalam arti yang luas misalnya sistem pendidikan nasional.

Pembaharuan dalam manajemen pendidikan sesungguhnya tidak hanya sekedar dalam arti etika rasional-empirik. Pandangan demikian telah membawa perubahan besar pada pola pikir manusia dan masyarakat modern, yang mendasarkan diri pada filsafat rasionalisme dan empirisme, sehingga realitas yang dianggap nyata adalah empirik, atau yang bisa dipikirkan secara rasional. Di luar semua itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak nyata. Walaupun pandangan ini telah menjadi landasan keilmuan dan studi-studi kependidikan, namun pandangan ini telah meruntuhkan nilai-nilai pendidikan yang hakiki. Pembangunan pendidikan yang sedang kita lakukan seharusnya menyentuh paradigma sistem pendidikan yang universal. Sistem pendidikan yang selalu didasarkan pada paradigma politik telah terbukti menghasilkan SDM yang bersifat mekanis dan kurang kreatif. Karena itu, untuk membangun pendidikan, tidak ada alternatif lain kecuali melakukan pembaruan orientasi dan pendekatan dalam manajemen pendidikan itu sendiri.

Disamping itu, kebijakan pembangunan pendidikan kurang menyeluruh dan terintegrasi antara dimensi-dimensi konsumtif dengan dimensi-dimensi investatif, sehingga setiap upaya pembaruan kurang

antisipatif dan berwawasan jauh ke depan. Akhirnya, kebijakan-kebijakan dalam sistem manajemen pembangunan pendidikan nasional yang seharusnya menyentuh dimensi sosial, ekonomi, budaya dan politik, malah lebih banyak bergantung pada sistem politik yang dianut dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pembaruan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan hidup dan penghidupan. Apa yang berbeda dengan setiap langkah dan prospek pembaruan yang akan datang akan semakin cepat dan memengaruhi setiap bagian dari kehidupan, termasuk nilai-nilai kepribadian, kesusilaan, kedaerahan, baik secara individu maupun kelompok. Pandangan ini menunjukkan bahwa dorongan untuk melakukan pembaruan mempunyai kekuatan dan sumber-sumber pendorong tertentu. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat berupa budaya kerja, teknologi, kecenderungan sosial, globalisasi, dan mungkin dalam tatanan politik dunia. Sumber kekuatan kerja, kemungkinan dari perbedaan cultural, peningkatan profesional, dan banyaknya hal baru yang bersumber dari otomatisasi sistem, komputerisasi, atau merekayasa kembali. Sumber kekuatan teknologi dapat bersumber dari otomatisasi sistem, komputerisasi, atau merekayasa kembali. Sumber kecenderungan sosial, mungkin dari pertumbuhan dan peningkatan pendidikan tinggi, penangguhan usia perkawinan. Sumber kekuatan globalisasi, mungkin dari pengaruh pasang surut pasar dunia, persaingan global, merger, akuisisi, dan konsolidasi. Ada lima tahapan dalam melakukan pembaruan, yaitu

berkenaan dengan tatanan budaya, struktur, teknologi, setting fisik lingkungan, dan manusia itu sendiri.

Pembaruan pada budaya ditekankan pada nilai dan tujuan-tujuan organisasi, Pembaruan dalam struktur difokuskan pada hubungan kewenangan, koordinasi dan redesain pekerjaan, pembaruan dalam teknologi ditekankan pada modifikasi bagaimana pekerjaan dapat diproses dan metode-metode serta peralatan dapat digunakan, pembaruan dalam setting fisik ditekankan pada area dan tata letak lingkungan pekerjaan, pembaruan pada manusia difokuskan pada kemampuan dan keterampilan.

Pembaruan organisasi pada dasarnya mempunyai dua sasaran mendasar yaitu penyesuaian organisasi dalam lingkungan dan mengubah perilaku anggota organisasi. Para pembaharu dapat melakukan langkah-langkah strategik. Pembaruan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan hidup dan penghidupan. Apa yang berbeda dengan setiap langkah dan prospek pembaruan yang akan datang akan semakin cepat dan memengaruhi setiap bagian dari kehidupan, termasuk nilai-nilai kepribadian, kesusilaan, kedaerahan, baik secara individu maupun kelompok. Pandangan ini menunjukkan bahwa dorongan untuk melakukan pembaruan mempunyai kekuatan dan sumber-sumber pendorong tertentu. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat berupa budaya kerja, teknologi, kecenderungan sosial, globalisasi, dan mungkin dalam tatanan politik dunia. Sumber kekuatan kerja, kemungkinan dari perbedaan kultural, peningkatan profesional, dan banyaknya hal baru yang bersumber

dari otomatisasi sistem, komputerisasi, atau merekayasa kembali. Sumber kecenderungan sosial, mungkin dari pertumbuhan dan peningkatan pendidikan tinggi, penangguhan usia perkawinan. Sumber kekuatan globalisasi, mungkin dari pengaruh pasang surut pasar dunia, persaingan global, merger, akuisisi, dan konsolidasi. Ada lima tahapan dalam melakukan pembaruan, yaitu berkenaan dengan tatanan budaya, struktur, teknologi, setting fisik lingkungan, dan manusia itu sendiri. Pembaruan pada budaya ditekankan pada nilai dan tujuan-tujuan organisasi, Pembaruan dalam struktur difokuskan pada hubungan kewenangan, koordinasi dan redesain pekerjaan, pembaruan dalam teknologi ditekankan pada modifikasi bagaimana pekerjaan dapat diproses dan metode-metode serta peralatan dapat digunakan, pembaruan dalam setting fisik ditekankan pada area dan tata letak lingkungan pekerjaan, pembaruan pada manusia difokuskan pada kemampuan dan keterampilan.

Pembaruan organisasi pada dasarnya mempunyai dua sasaran mendasar yaitu penyesuaian organisasi dalam lingkungan dan mengubah perilaku anggota organisasi. Para pembaru atau inovator dapat melakukan langkah-langkah strategik. Inovasi pendidikan menurut Hamijoyo (1974) adalah suatu perubahan yang baru, berbeda dari sebelumnya serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Dari defenisi tersebut dapat dijabarkan beberapa istilah yang menjadi kunci pengertian inovasi pendidikan, sebagai berikut :

a. Baru

Dalam inovasi dapat diartikan apa saja yang belum dipahami, diterima atau dilaksanakan oleh penerima inovasi, meskipun mungkin baru lagi bagi orang lain. Akan tetapi, yang lebih penting dari sifatnya yang baru ialah sifat kualitatif berbeda dari sebelumnya.

b. Kualitatif

Kualitatif berarti inovasi itu memungkinkan adanya reorganisasi atau pengaturan kembali unsure-unsur dalam pendidikan. Jadi, bukan semata-mata penjumlahan atau penambahan unsur-unsur setiap komponen. Tindakan menambah anggaran belanja supaya lebih banyak mengadakan murid, guru, kelas, dan sebagainya meskipun perlu dan penting, bukan merupakan tindakan inovasi, akan tetapi tindakan mengatur kembali jenis dan pengelompokan pelajaran, waktu, ruang kelas, cara-cara menyampaikan pelajaran sehingga dengan tenaga, alat, uang, dan waktu yang sama dapat menjangkau sasaran siswa yang lebih banyak dan dicapai kualitas yang lebih tinggi adalah tindakan inovasi.

c. Kesengajaan

Inovasi pendidikan dan kebijakannya serta strategi untuk melaksanakannya bukanlah merupakan sesuatu yang dengan secara kebetulan terjadi akan tetapi dilakukan dengan cara terencana dan tersusun.

d. Tujuan

Hasil-hasil yang ingin dicapai dalam inovasi pendidikan harus dirinci dengan jelas. Ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara keadaan setelah dan sebelum dilakukannya inovasi pendidikan.

Menurut Miller pengertian inovasi pendidikan adalah pemberian konkrit tentang sebuah ide atau gagasan dalam pendidikan yang terorganisir sesuai aspek dari sistem sosial yang nampak secara jelas saling berhubungan. Dalam banyak hal inovasi pendidikan berlangsung dalam konteks sistem yang lebih besar dari lingkup sekolah. Berikut ini contoh-contoh inovasi pendidikan dalam setiap bagian dari sistem sosial sesuai dengan yang dikemukakan Miller (1973):

a. Pembinaan personalia

Pendidikan yang merupakan bagian dari system sosial tertentu menentukan personil (orang) sebagai komponen sistem. Inovasi yang sesuai dengan komponen personalia misalnya peningkatan mutu guru dan aturan tata tertib siswa.

b. Fasilitas fisik

Sistem sosial termasuk juga system pendidikan mendayagunakan berbagai saran dan hasil teknologi untuk mencapai tujuan. Inovasi pendidikan yang tepat untuk komponen ini contohnya adalah penggunaan CCTV.

c. Penggunaan waktu

Suatu sistem pendidikan tentu memiliki perencanaan penggunaan waktu. Inovasi yang relevan dengan komponen ini adalah pengaturan waktu belajar (semester, catur wulan, pembuatan jadwal pelajaran).

d. Prosedur

Sistem pendidikan tentu mempunyai prosedur untuk mencapai tujuan. Inovasi pendidikan yang relevan dengan komponen ini contohnya adalah penggunaan kurikulum baru.

e. Peran yang Diperlukan

Dalam sistem sosial termasuk sistem pendidikan diperlukan kejelasan peran yang diperlukan untuk melancarkan jalannya pencapaian tujuan. Inovasi yang relevan misalnya adalah peran pengajar sebagai pemakai media, maka diperlukan keterampilan menggunakan berbagai macam media.

f. Wawasan dan Perasaan

Dalam interaksi sosial biasanya berkembang suatu wawasan dan perasaan tertentu yang akan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kesamaan wawasan dan perasaan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditentukan akan mempercepat tercapainya tujuan. Inovasi yang relevan contohnya adalah wawasan pendidikan seumur hidup.

g. Bentuk Hubungan Antar Bagian (Mekanisme Kerja)

Dalam sistem pendidikan perlu ada kejelasan hubungan antara

bagian atau mekanisme kerja antara bagian dalam pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan. Inovasi pendidikan yang relevan dengan komponen ini misalnya adalah perubahan pembagian tugas antara seksi di kantor departemen pendidikan dan mekanisme kerja antar seksi.

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dengan diberlakukannya inovasi pendidikan yakni:

a. Guru

Guru sebagai ujung tombak dari pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaruan pendidikan keterlibatan guru mulai dari perencanaan inovasi pendidikan sampai pelaksanaan dan evaluasinya memainkan peran yang besar bagi keberhasilan suatu inovasi pendidikan.

b. Siswa

Sebagai objek utama dalam pendidikan terutama dalam proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang sangat dominan. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelegensia, daya motorik, pengalaman, kemauan dan komitmen yang timbul tanpa ada paksaan. Hal ini dapat terjadi apabila siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, walaupun hanya dengan mengenalkan kepada mereka tujuan dari perubahan itu mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan,

sehingga apa yang mereka lakukan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan dengan konsekuen.

c. Kurikulum

Kurikulum merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kurikulum dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, memegang peran yang sama pentingnya dengan unsur-unsur lainnya. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan dapat berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri. Oleh karena itu dalam pembaharuan pendidikan, perubahan itu hendaknya sesuai dengan perubahan kurikulum atau perubahan kurikulum diikuti dengan pembaharuan pendidikan dan tidak mustahil perubahan dari keduanya akan berjalan searah.

d. Fasilitas

Dalam pembaharuan pendidikan, fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan.

e. Lingkup sosial masyarakat

Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlihat dalam perubahan tersebut tapi bisa membawa dampak, baik positif ataupun negatif dalam pelaksanaan pembaruan pendidikan. Masyarakat sengaja ataupun tidak sengaja, secara langsung atau tidak langsung, terlibat dalam pendidikan. Sebab apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah

masyarakat menjadi lebih baik terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal.

Menurut Sanusi (2014) untuk dapat memahami mutu, relevansi dan efisiensi dari suatu sistem pendidikan, dapat dibuat suatu kajian yang relevan dengan konsep berikut ini:

a. *Returns to education*

Jelaskan pengertian berikut aspek-aspeknya, lalu uraikan pula faktor-faktor yang ada hubungan fungsionalnya.

b. Standar-standar pendidikan

Uraikan dan jelaskan macam-macam komponen standar, motif, dan tujuan di belakang kebijakan standarisasi, siapa atau badan mana yang berwenang menetapkan sistem standar pendidikan itu, ada beberapa komponen dan aspek yang (layak) distandarkan, apa syarat-syarat supaya dapat dilakukan secara efektif, siapa yang wajib menjalankannya, ada berapa kemungkinan kualifikasi dalam standar-standar itu, apa konsekuensi atau akibat hukumnya, dan apa pula implikasi kemasyarakatannya bagi para stakeholder pendidikan itu.

c. Berfikir

Uraikan bahwa pendidikan di manapun dan di waktu manapun tidak lepas dari proses belajar-mengajar, bahwa mengajar adalah mendorong orang supaya makin mampu belajar mandiri secara bermakna itu tidak lepas dari gaya serta keterampilan berfikir.

Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam

mengimplementasikan inovasi pendidikan yaitu sebagai berikut:

- a. Membuat gagasan baru dalam pembelajaran
- b. Membuat gagasan baru dalam peningkatan profesionalisme guru
- c. Melakukan pembaruan teknologi
- d. Pengembangan sekolah (Ibrahim, 2003:177)

4. Mutu Pendidikan

Mutu atau kualitas adalah kesesuaian untuk penggunaan (*fitness for use*), ini berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh pengguna. Hal yang perlu diketahui sebelum suatu produk atau jasa (seperti proses pendidikan) mulai diproduksi adalah apakah produk atau jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan. Hal ini merupakan alasan utama perlunya dilakukan riset untuk mengidentifikasi kebutuhan para pelanggan dan pentingnya berkomunikasi dengan pelanggan internal dan eksternal. L. C. Solmon dalam tulisannya yang berjudul *The Quality of Education* menyatakan bahwa untuk memahami kualitas pendidikan diperlukan pertimbangan tentang bagaimana kualitas itu diukur. Dalam hubungan ini terdapat beberapa sudut pandang dalam mengukur kualitas pendidikan yaitu:

- a. Pandangan yang menggunakan pengukuran pada hasil pendidikan (sekolah atau *College*)
- b. Pandangan yang melihat pada proses pendidikan.

Sudut pandang tersebut di atas, masing-masing punya

kelemahannya, namun demikian pengukuran di atas tetap perlu dalam melihat masalah kualitas pendidikan, yang jelas diakui bahwa masalah peningkatan kualitas pendidikan bukanlah hal yang mudah . Pembuktian kualitas pendidikan tidaklah mudah dicapai dengan proses yang singkat, melainkan membutuhkan usaha yang panjang dengan cara perubahan organisasi. Ini berarti bahwa banyak aspek yang berkaitan dengan kualitas pendidikan, dan suatu pandangan komprehensif mengenai kualitas pendidikan merupakan hal yang penting dalam memetakan kondisi pendidikan secara utuh, meskipun tataran praktis, titik tekan dalam melihat kualitas bisa berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuan suatu kajian atau tinjauan. Kualitas pendidikan bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, dia merupakan hasil dari suatu proses pendidikan, jika suatu proses pendidikan berjalan baik, efektif dan efisien, maka terbuka peluang yang sangat besar memperoleh hasil pendidikan yang berkualitas. Kualitas pendidikan mempunyai kontinum dari rendah ke tinggi sehingga berkedudukan sebagai suatu variabel, dalam konteks pendidikan sebagai suatu sistem, variabel berkualitas pendidikan dapat dipandang sebagai variabel bebas yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kepemimpinan, iklim organisasi, kualitas guru, anggaran, kecukupan fasilitas belajar, dan sebagainya. Ada banyak sumber mutu dalam pendidikan, misalnya sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis dan komunitas lokal, sumber daya yang melimpah, aplikasi

teknologi yang mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian terhadap pelajaran anak didik, kurikulum yang memadai, atau juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Sementara itu Nanang Fatah (2000: 90) mengemukakan upaya peningkatan mutu dan perluasan pendidikan membutuhkan sekurang-kurangnya tiga faktor utama yaitu: (1) kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti kualitas tenaga kependidikan dan sarana belajar, (2) mutu proses belajar mengajar yang mendorong siswa belajar efektif, (3) mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap keterampilan, dan nilai-nilai. Jadi, kecukupan sumber, mutu proses belajar mengajar, dan mutu keluaran akan dapat terpenuhi jika dukungan biaya yang dibutuhkan dan tenaga profesional dapat disediakan di sekolah.

Masalah mutu dalam era merupakan masalah yang sangat berkaitan erat dengan suatu organisasi. Oleh karena itu upaya menjadikan organisasi tetap bertahan, masalah kualitas harus menjadi perhatian termasuk dalam bidang pendidikan, oleh karenanya maka penjaminan kualitas menjadi suatu keharusan untuk diterapkan dalam suatu organisasi. Dalam dunia pendidikan penjaminan mutu harus menjadi *concern* bersama mengingat masih diperlukannya upaya yang serius guna meningkatkan kualitas pendidikan serta persaingan global dalam bidang pendidikan yang menunjukkan kecenderungan makin meningkat dengan baik. Pemerintah melakukan inovasi-inovasi bidang pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada.

Inovasi-inovasi yang dilakukan dilatarbelakangi oleh program yang

sudah ada seringkali belum mampu untuk mencapai kualitas yang diharapkan oleh pemerintah. Inovasi-inovasi dimaksudkan supaya penyelenggaraan pendidikan ke depannya lebih bermutu, lebih relevan, dan lebih efisien. Semua itu, mesti bermanfaat bagi pembangunan Negara, sosial-budaya dan lain sebagainya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah tersebut harus mampu menangkap setiap perubahan-perubahan yang terjadi, apakah efektif atau sebaliknya. Keberhasilan inovasi yang diadakan oleh pemerintah dianggap berhasil apabila mutu pendidikan telah sesuai dengan apa yang diharapkan.

D. Konsep Profesionalisme Guru

Profesionalisme berasal dari kata istilah *professional* yang dasar katanya adalah profesi. Menurut Supriadi (1999) kata *professional* merujuk pada dua hal: pertama adalah orang yang menyanggah suatu profesi, orang yang biasanya melakukan pekerjaan secara otonom dan dia mengabdikan diri pada pengguna jasa disertai rasa tanggung jawab atas kemampuan profesionalnya. Kedua adalah kinerja atau *performance* seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Profesionalisme merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan, atau rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi. Profesionalisme itu berkaitan dengan komitmen para penyanggah profesi. Untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya secara terus-menerus, mengembangkan strategi-strategi baru dalam tindakannya melalui proses

pembelajaran yang terus-menerus pula.

Penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola proses pembelajaran, mengelola siswa dan melakukan tugas-tugas bimbingan merupakan cirri guru dapat dikatakan profesional (Danim: 2002). Pengembangan profesionalisme guru bertujuan untuk (1) kebutuhan sosial yang meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi, serta melakukan adaptasi untuk penyusunan kebutuhan-kebutuhan sosial, (2) kebutuhan untuk menemukan cara-cara untuk membantu staf pendidikan guna mengembangkan pribadinya secara luas, (3) kebutuhan untuk membantu dan mendorong kegiatan guru untuk membantu siswa dalam mengembangkan keinginan dan keyakinan untuk memenuhi tuntutan pribadi yang sesuai dengan potensi dasarnya.

1. Bentuk-bentuk profesionalisme guru

ada beberapa hal yang menjadi ciri-ciri guru dinyatakan profesional, antara lain (1) guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru adalah kepada peserta didiknya, (2) guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada peserta didik, bagi guru hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, (3) guru bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku peserta didik sampai tes hasil akhir, (4) guru mampu berpikir secara sistematis tentang apa yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya. Artinya, harus selalu ada waktu untuk guru guna melakukan refleksi dan koreksi

terhadap apa yang telah dilakukannya, (5) guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Untuk melihat apakah seorang guru dikatakan professional atau tidak, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dilihat dari tingkat pendidikan minimal dari latar belakang pendidikan untuk jenjang sekolah tempat menjadi guru. Kedua, penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola proses pembelajaran, mengelola siswa, melakukan tugas-tugas bimbingan. (Danim, 2002)

2. Inovasi Pendidikan Bidang Profesionalisme Guru

Sekarang adalah era di mana globalisasi tidak bisa dibendungm teknologi yang semakin maju dan canggih memaksa manusia untuk bisa menyesuaikan diri dengan hal-hal d era globalisasi ini. Institusi pendidikan formal mempunyai tugas untuk menyiapkan dan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Di dunia persekolahan, guru professional menjadi faktor utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) peserta didinya. Guru sebagai tenaga profesionalisme memiliki peranan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap anak didiknya agar kelak dapat berguna bagi bangsa dan negara. Guru merupakan pilar utama demi mewujudkan tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan mencapai tujuan yang bermutu. Secara kuantitatif guru memiliki jumlah yang banyak, namun tidak semuanya memiliki kualitas tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi pedaginis, kognitif, professional, dan sosial. Selain itu selengkap apapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah namun apabila tenaga pendidiknya tidak memiliki kompetensi yang mumpuni maka sarana dan prasarana tersebut tidak akan membantu para peserta

didik secara efektif dalam proses belajar mengajar. Berikut ini adalah inovasi dalam profesionalisme guru:

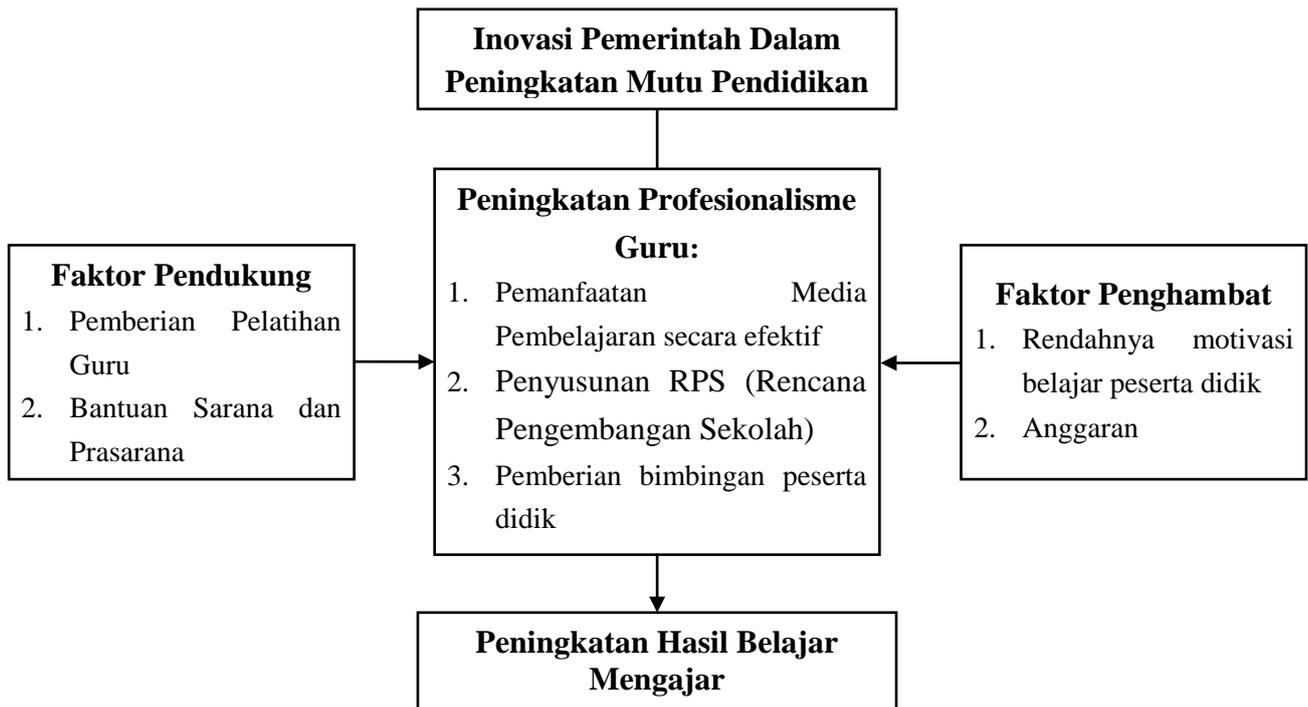
- a. peningkatan kemampuan guru melalui organisasi profesi
- b. peningkatan kemampuan guru melalui supervise pendidikan
- c. peningkatan kemampuan melalui kualifikasi dan pembinaan guru
- d. peningkatan kemampuan guru melalui sertifikasi
- e. peningkatan kesejahteraan
- f. penyelenggaraan pelatihan dan sarana

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam penelitiannya. Melalui kerangka pikir ini, maka tujuan dilakukan penelitian semakin jelas telah terkonsep terlebih dahulu.

Permasalahan mutu pendidikan yang rendah tidak terlepas dari masalah profesionalisme guru. Pemerintah walaupun telah melakukan inovasi dari sektor pendidikan namun mengingat masalah pendidikan adalah masalah yang menyangkut berbagai aspek maka diperlukan adanya penanganan yang serius.

Dengan melihat permasalahan tersebut di atas maka diperlukan adanya upaya yang maksimal dalam menangani masalah pendidikan terutama menyangkut masalah profesionalisme guru. Berikut ini adalah bagan kerangka pikir:



Gambar 1: Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini untuk mengetahui inovasi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam bidang peningkatan profesionalisme guru. Fokus penelitian ini meliputi:

1. Pemanfaatan Media Pembelajaran secara efektif
2. Penyusunan rencana pembelajaran
3. Pemberian bimbingan peserta didik

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pemanfaatan media secara efektif adalah hal yang dilakukan dengan memanfaatkan media yang ada. Di Kabupaten Gowa media pembelajaran sudah sampai pada tahap yang berbasis teknologi. Hal tersebut akan mendukung dalam upaya peningkatan profesionalisme guru.
2. RPS atau singkatan dari Rencana pengembangan sekolah merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan.
3. Pemberian bimbingan di luar jam belajar adalah pembimbingan peserta didik oleh guru.
4. Pemberian pelatihan bagi guru dimaksudkan untuk membantu melatih kemampuan dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengajar. Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mendukung peningkatan profesionalisme guru mengeluarkan program Pusat Belajar Guru atau PBG.
5. Bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah membantu pelaksanaan peningkatan profesionalisme guru di Kabupaten Gowa.
6. Motivasi belajar siswa rendah menjadi faktor penghambat dalam diimplementasikannya inovasi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam hal peningkatan profesionalisme guru.
7. Anggaran, anggaran dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Gowa masih rendah, olehnya itu program-program yang ada masih terkendala dengan permasalahan anggaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, dari bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2017. Lokasi dilaksanakannya penelitian ini adalah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena akan lebih memudahkan penulis untuk mendapatkan data-data yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah) atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya orientasi terhadap politik, isu, dan perubahan). (Creswell, 2003).
2. Tipe penelitian adalah tipe penelitian fenomenologi yaitu penelitian yang

bertujuan untuk memperoleh, menjelaskan, atau mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji.

C. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka diperlukan data primer dan data sekunder, dimana :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari informan, data primer diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber bahan-bahan bacaan, dokumen-dokumen, jurnal dan laporan yang relevan dengan penelitian.

D. Informan Penelitian

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 orang. Informan sejak awal telah ditentukan karena mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Informan tersebut adalah :

Tabel II : Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1	Drs. Syarifuddin, M. Pd.	SH	Kepala Bidang	1 orang

			Pendidikan Dasar dan Menengah	
2	Drs. H. Baharuddin M	BA	Seksi Sarana & Prasarana Pendidikan	1 orang
3	Dra. Hj. St. Rohani, MM.	RN	Seksi Menejemen Pendidikan	1 orang
4	St. Kamariah, S.Pd.	KM	Guru SD Inpres Ciniayo	1 orang
5	Nurul Fadhilah Syarief, S.Pdi.	NF	Guru SMPN I Bajeng	1 orang
6	Ruli Irawan, S.Pd.	RI	Kepala Sekolah	1 orang
Total				6 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, merupakan metode penelitian yang digunakan dengan cara mengamati langsung hal-hal yang berkaitan dengan inovasi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Gowa.
2. Wawancara, wawancara mendalam (*indepth interviews*), yaitu teknik memperoleh data melalui proses tanya jawab, wawancara dilakukan terhadap informan untuk mendapatkan data yang valid dan relevan. Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan maka alat yang mendukung proses wawancara adalah perekam, pulpen, buku, dan dilengkapi dengan foto dokumentasi.
3. Dokumen, data sekunder diperoleh dari Pemerintah Daerah (Pemda) melalui catatan-catatan, notulen, rapat, buku, dan petunjuk yang berhubungan sehingga dapat mendukung dan melengkapi data primer yang ada relevansinya dengan keperluan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Ada beberapa aktivitas dalam analisis data menurut teori Miles dan

Huberman (1984), yakni :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi Data (*Data Reduction*) merupakan data yang diperoleh di lapangan yang jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Miles dan Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data juga dapat berupa grafik, matriks, dan network.

3. *Conclusion Drawing/verification*

Data yang diperoleh masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Keabsahan Data

Setelah menganalisis data, peneliti harus memastikan apakah interpretasi dan temuan penelitian akurat.

Triangulasi merupakan proses penyokongan bukti terhadap temuan, analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan peneliti yang berasal dari

individu (informan) yang berbeda, tipe atau sumber data (wawancara, pengamatan dan dokumen, serta metode pengumpulan data (Moleong: 2000).

Ada beberapa jenis triangulasi yakni:

1. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dari sumber yang sama, namun dengan teknik-teknik yang berbeda.

2. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek semua data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

3. Triangulasi waktu

Untuk mendapatkan kepastian data, maka triangulasi waktu ini dapat dimanfaatkan. Triangulasi ini sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang telah dikumpulkan dengan teknik wawancara kepada narasumber yang sama, mungkin saja akan mengalami perubahan beberapa waktu kemudian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Profil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa terletak di Jalan Masjid Raya Nomor 30, Sungguminasa, Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan yang di mana kantor tersebut masih berada dalam lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Gowa. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa.

2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa

Dalam pembentukannya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa memiliki visi dan misi.

Adapun visi dan misi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Gowa yaitu:

a. Visi :

“Terselenggaranya layanan pendidikan yang prima untuk membentuk manusia yang berkualitas dalam rangka mewujudkan Kabupaten Gowa sebagai Kabupaten Pendidikan”.

b. Misi

- 1) Menyediakan layanan pendidikan yang merata dan terjangkau
- 2) Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan
- 3) Menyiapkan semua kebutuhan dan fasilitas proses belajar mengajar yang sesuai dengan kebutuhan standar minimal.

Adapun Misi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas hasil belajar dan lulusan peserta didik
- 2) Tumbuhnya SDM yang kreatif

c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tentang uraian Tugas Jabatan Struktural di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, maka jabatan strukturalnya adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- c) Sub Bagian Keuangan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional
 - a) Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - (1) Seksi Manajemen Pendidikan
 - (2) Seksi Pembina Tenaga Pendidik dan Kependidikan
 - (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
 - (4) Seksi Manajemen Pendidikan Menengah
 - (5) Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
 - (6) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - b) Bidang Pendidikan Non Formal dan Pra Sekolah
 - (1) Seksi Pendidikan Non Formal
 - (2) Seksi Pendidikan Pra Sekolah
 - (3) Seksi Sarana dan Prasarana Non Formal dan Pra Sekolah
 - c) Bidang Pemuda dan Olahraga
 - (1) Seksi Pembinaan Kepemudaan
 - (2) Seksi Pengembangan Olahraga
 - (3) Seksi Pengembangan Minat dan Bakat
 - d) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

B. Inovasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan dalam Bidang Peningkatan Profesionalisme Guru

Segala bentuk kebijakan dalam bidang pendidikan yang diambil oleh pemerintah merupakan sebuah ciri akan usaha peningkatan mutu pendidikan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik yang dilakukan oleh pemerintah.

Kualitas pendidikan yang baik bukanlah merupakan suatu hal yang mudah untuk dicapai dan diperoleh mengingat masalah-masalah dalam dunia pendidikan merupakan sebuah hal yang sangat kompleks atau beraneka ragam.

Pemerintah Kabupaten Gowa sendiri saat ini sedang giat mencanangkan program Gowa sebagai Kabupaten Pendidikan. Untuk mewujudkan program pemerintah Kabupaten Gowa tersebut membutuhkan usaha dan upaya yang terbilang tidak sedikit oleh karenanya salah satu indikator yang perlu terpenuhi agar Kabupaten Gowa mampu memenuhi syarat untuk menjadi Kabupaten Pendidikan adalah mutu dan kualitas guru yang ada di kabupaten Gowa itu sendiri.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gowa:

“Kami selaku pemerintah Kabupaten Gowa ingin menjadikan daerah ini sebagai daerah yang tingkat pendidikannya selalu terdepan dan unggul di Sulawesi Selatan bahkan di Indonesia, oleh karena maksud itu kami selalu berupaya untuk mengeluarkan kebijakan dalam bidang pendidikan yang berpihak kepada masyarakat luas serta selalu memaksimalkan program tersebut agar mutu pendidikan selalu meningkat ke arah yang lebih baik tentunya. Oleh karena itu kami hadirkan inovasi dalam bidang pendidikan dengan melakukan berbagai macam program yang dianggap baik dan sesuai dengan kondisi masyarakat” (Hasil wawancara dengan SH, 19 Februari 2017)

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Gowa, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa menerapkan inovasi dalam pendidikan demi terwujudnya mutu pendidikan yang baik.

Guru yang profesional menjadi harapan kita semua, karena dengan

adanya peningkatan kemampuan guru sehingga menjadi guru yang profesional diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan. Peserta didik perlu dididik dan dibina oleh guru-guru yang profesional sehingga kualitas/mutu yang dihasilkan akan lebih maksimal.

1. Pemanfaatan Media Pembelajaran Secara Efektif

Mutu sebuah lembaga pendidikan dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai peserta didik. Peningkatan mutu pendidikan suatu sekolah dapat dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung pembelajaran di sekolah supaya dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan peserta didik yang memiliki kualitas lulusan yang baik. Salah satu caranya adalah dengan penggunaan media yang tepat oleh guru. Penggunaan media yang tepat akan mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah. Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa:

“Media pembelajaran merupakan alat atau perantara yang dapat membantu seorang guru dalam proses belajar, mengajar serta berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik di samping itu siswa juga dapat jauh dari rasa jenuh jika sumber belajar yang digunakan oleh guru hanya terdiri dari buku cetak pelajaran, untuk itu guru yang baik harus menguasai media terlebih media yang bersentuhan dengan teknologi seperti komputer” (Hasil wawancara dengan SH, 20 Februari 2017)

Hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses.

Dalam proses pembelajaran kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Untuk lebih mengetahui tentang gambaran pemanfaatan media secara efektif dalam meningkatkan profesionalisme guru penulis melakukan wawancara dengan Seksi Manajemen Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Gowa:

“Kami di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini ingin memanfaatkan teknologi sebagai media yang membantu para guru dalam mengembangkan kompetensi mereka. Di era saat ini, kita butuh teknologi karena pendidikan kita harus menyesuaikan dengan era digital. Oleh karena itu, media yang digunakan para guru di sini sudah berbasis teknologi” (Hasil wawancara dengan RN, 10 Februari 2017)

Hasil wawancara di atas didukung dengan hasil wawancara dengan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa:

“Memang betul kalau kelengkapan media yang digunakan oleh guru sudah berbasis teknologi. Misalnya guru menggunakan laptop/komputer pada saat mengajar. Laptop digunakan untuk menyeimbangkan guru dengan para peserta didik yang pemikirannya sudah semakin maju, jadi kami harapkan para guru untuk menyesuaikan diri dengan keadaan era digital” (Hasil wawancara dengan BA, 11 Februari 2017)

Hasil wawancara di atas menunjukkan Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mendorong profesionalisme guru dengan pemanfaatan media secara efektif. Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu informan, Guru SD Inpres Ciniayo:

“Inovasi ini sangat dibutuhkan karena sesuai dengan kondisi saat ini. Guru tidak perlu terlalu menjelaskan di papan tulis, akan tetapi kita gunakan komputer dan bantuan LCD. Jadi, penguasaan TIK oleh seorang guru harus dimiliki karena jangan

sampai siswa membuat guru malu karena tidak menguasai teknologi mulai dari penggunaan-penggunaan media yang tentunya membutuhkan penguasaan TIK seperti LCD dan laptop” (Hasil wawancara dengan KM, 3 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa teknologi saat ini telah menjadi suatu masalah yang sangat penting bagi dunia pendidikan di Kabupaten Gowa, penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi mendukung program pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Gowa yang tidak terlepas dari upaya peningkatan profesionalisme guru. Upaya alih ilmu dan penggunaan media berteknologi diartikan sebagai penggunaan pengetahuan teknologi bersama-sama dengan sumber daya yang tersedia.

Upaya pemerintah kabupaten Gowa dalam peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan dengan berbagai cara diantaranya program pemerintah yaitu penerapan sistem belajar berbasis teknologi pada Punggawa D’Emba Education Program (PDEB). Program, ini mampu memberikan akses kepada para guru untuk menggunakan teknologi dalam mengajar. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa:

“Punggawa D’Emba Education Program (PDEB) adalah program pemerintah Kabupaten Gowa yang membantu para guru untuk meningkatkan profesionalismenya. Kami harapkan program ini bisa berhasil, di mana guru bisa memanfaatkan media pembelajaran yang ada yang berbasis teknologi” (Hasil wawancara dengan BA, 11 Februari 2017)

Peningkatan profesionalisme serta mutu dan kualitas seorang guru dengan pemanfaatan media pembelajaran secara efektif berbasis teknologi

merupakan inovasi yang bertujuan untuk melatih kemampuan guru di era digital seperti sekarang.

Peningkatan profesionalisme guru dengan pemanfaatan media pembelajaran secara efektif berbasis teknologi merupakan inovasi yang bertujuan untuk melatih kemampuan guru di era digital.

2. Penyusunan RPS (Rencana Pengembangan Sekolah) oleh Guru

RPS atau singkatan dari Rencana pengembangan sekolah merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan (metode, model, dan teknik) serta cara menilainya menjadi jelas dan sistematis, sehingga proses belajar selama satu semester menjadi efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Manajemen Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa:

“Keberhasilan pembelajaran tidak hanya dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh siswa, tetapi juga dari segi prosesnya. Hasil belajar pada dasarnya merupakan akibat dari suatu proses belajar. Ini berarti optimalnya hasil belajar siswa tergantung pula pada proses belajar siswa dan proses mengajar guru. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas guru sangat diperlukan” (Hasil wawancara dengan RN, 20 Februari 2017)

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa kualitas seorang guru mutlak diperlukan dan dibutuhkan dalam sebuah proses pembelajaran olehnya itu penguasaan guru dalam hal teknik penilaian, metode mengajar dan lainnya merupakan tuntutan yang harus dimiliki oleh seorang guru.

Penulis pun melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah, berikut ini hasil wawancaranya:

“Seorang guru perlu memahami apa sebenarnya kegunaan dan apa isi dari RPS itu sendiri, kebanyakan dari mereka memahami bahwa RPS adalah tugas dari kepala sekolah secara utuh karena berkenaan dengan pengembangan sekolah padahal RPS itu sendiri masuk didalamnya kemampuan guru dalam menyusun perangkat-perangkat pembelajaran yang ada” (Hasil wawancara dengan RI, 10 Februari 2017)

Hasil wawancara tersebut di atas menegaskan bahwa tugas seorang guru dalam menyusun RPS adalah berkenaan dengan pembuatan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan pengembangan silabus atau yang sering dikenal dengan sebutan perangkat pembelajaran. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan silabus harus dimiliki seorang guru karena menjadi acuan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Untuk lebih mengetahui gambaran tentang pembuatan RPS maka penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa:

“Pembuatan RPP dan Silabus dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) merupakan sesuatu yang berkenaan dengan baik tidaknya kualitas pembelajaran dalam suatu satuan pendidikan hal tersebut membuat pemerintah kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Pendidikan menggiatkan wadah bagi para guru untuk mampu menyusun RPP atau silabus dengan baik seperti dengan adanya MGMP” (Hasil wawancara dengan SH, 10 Februari 2017)

Hasil wawancara tersebut di atas juga didukung oleh Guru SD Inpres Ciniayo :

“Kami membuat RPS dengan semaksimal mungkin dan mengupayakan membuat perangkat-perangkat pembelajaran

yang baik dan benar karena itu merupakan acuan yang akan mempengaruhi tindakan kelas yang akan kami lakukan ke depannya yang sangat mempengaruhi hasil belajar dari peserta didik itu sendiri” (Hasil wawancara dengan KM, 10 Maret 2017)

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa RPS merupakan petunjuk untuk menjalankan proses belajar mengajar yang kondusif serta memberikan dasar untuk mengolah interaksi guru di kelas dengan peserta didik. Seperti yang dikatakan oleh Guru SMP Negeri 1 Bajeng:

“Saya ikut bekerja sama dengan rekan guru lainnya dalam membuat RPS agar lebih mudah untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan saya dalam mengajar. RPS sangat berguna bagi saya karena mampu memahami apa yang harus atau yang akan menjadi acuan di sekolah utamanya sebagai seorang guru dalam kelas RPS yang memuat program pengembangan sekolah memotivasi guru untuk membuat RPP dan silabus sesuai dengan tema pembelajaran akan saya ketahui dengan mudah langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan. (Hasil wawancara dengan NF, 2 Maret 2017)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pembuatan RPP maupun silabus dalam proses pembelajaran adalah agar seorang guru dapat mengerti dan faham tentang metode mana yang sesuai dan tepat untuk digunakan, sehingga proses pembelajaran itu terarah atau sesuai dengan materi pelajaran dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Salah satu syarat untuk menjadi seorang guru profesional adalah perlu dimilikinya kemampuan menyusun program-program pembelajaran yang terdapat dalam RPS agar kualitas pembelajaran menjadi bermutu dan berkualitas. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru demi tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan.

Kabupaten Gowa yang mencanangkan peningkatan sumber daya

guru melalui pembentukan program-program kerja jangka panjang dalam RPS selalu mengupayakan sistem kerja yang diterapkan guru di sekolah berbobot dan mempunyai kualitas serta senantiasa secara tekun mengembangkan dan mempersiapkan diri sebagai seorang tenaga pendidik yang profesional dan berkompeten sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Sementara jumlah guru yang ada di Kabupaten Gowa sendiri dari data yang diperoleh tercatat sebesar :

Tabel III : Rekapitulasi Jumlah Guru di Kabupaten Gowa

No	Kecamatan	Jenjang	JML Sekolah	Jumlah Guru		Total
				PNS	NON PNS	
1	Bajeng	SD	36	263	151	414
		SMP	7	118	122	240
		SDLB	2	6	15	21
2	Barombong	SD	16	110	90	200
		SMP	2	44	24	68
3	Bajeng Barat	SD	15	118	66	184
		SMP	3	49	42	91
		SDLB	1			
4	Biringbulu	SD	24	146	113	259
		SMP	8	24	43	67
5	Bontonompo	SD	28	219	87	306
		SMP	5	78	41	119
		SDLB	1			
6	Bontonompo Selatan	SD	20	144	88	232
		SMP	3	34	25	59
7	Pallangga	SD	39	315	227	542
		SMP	7	168	71	239
		SDLB	1	10		10
8	Bontomarannu	SD	19	159	101	260
		SMP	4	71	34	105
9	Somba Opu	SD	49	382	390	772

No	Kecamatan	Jenjang	JML Sekolah	Jumlah Guru		Total
				PNS	NON PNS	
		SMP	16	267	200	467
		SDLB	1			
10	Parigi	SD	13	76	39	115
		SMP	4	31	14	45
11	Bontolempangan	SD	13	76	47	123
		SMP	7	23	40	63
12	Bungaya	SD	16	98	82	180
		SMP	6	15	46	61
13	Tingimoncong	SD	25	122	75	197
		SMP	6	40	22	62
14	Tombolo Pao	SD	27	136	79	215
		SMP	8	38	43	81
15	Tompobulu	SD	22	147	78	225
		SMP	5	39	31	70
16	Manuju	SD	16	72	86	158
		SMP	6	36	51	87
17	Parangloe	SD	17	114	70	184
		SMP	4	32	14	46
18	Pattalassang	SD	16	97	73	170
		SMP	6	46	36	82
JUMLAH			524	3963	2856	6819

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa.

Tabel di atas membuktikan bahwa kabupaten Gowa memiliki jumlah tenaga pengajar yang tidak sedikit. Kabupaten Gowa yang memiliki sumber daya yang banyak. Harus mengupayakan guru untuk memiliki gagasan baru dalam pembelajaran yang merupakan sesuatu yang dialami dan ditempuh oleh seorang guru untuk memaksimalkan proses belajar mengajar dalam hal ini mutu dan profesionalisme guru tersebut.

3. Pemberian Bimbingan Belajar Peserta Didik

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terus berupaya mengembangkan inovasi baru yang mampu membantu guru maupun peserta didik dalam segala proses pendidikan yang ada. Salah satu upaya baru yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah dalam membantu meningkatkan profesionalisme guru adalah pemberian bimbingan belajar peserta didik di luar jam pelajaran. Untuk lebih mengetahui tentang hal ini penulis melakukan wawancara dengan Seksi Manajemen Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa”

“Di Kabupaten Gowa saat ini para guru tidak hanya membimbing para peserta didik pada saat jam belajar di kelas, namun mereka membantu memberikan bimbingan di luar jam pelajaran. Tentu hal ini adalah hal yang baru di sini. Tujuan dari dilaksanakannya hal tersebut adalah supaya para peserta didik mampu untuk belajar lebih dan guru juga bisa melatih kemampuannya secara lebih maksimal” (Hasil wawancara dengan RN, 10 Februari 2017)

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemberian bimbingan belajar di luar jam belajar merupakan upaya untuk membantu guru dalam meningkatkan profesionalismenya. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan guru SD Inpres Ciniayo:

“Saya membantu peserta didik dengan memberikan pemahaman sesuai dengan mata pelajaran yang mereka mengalami kesulitan memahaminya. Contohnya mata pelajaran Matematika, apabila ada anak yang tidak memenuhi syarat untuk lulus dalam mata pelajaran tersebut maka di jam istirahat saya bantu dia untuk belajar sampai dia benar-benar paham. Namun kadang saya mendapatkan tantangan di mana peserta didik sulit untuk memahami pelajaran tersebut sehingga perlu waktu yang agak lama untuk membuat mereka menuntaskannya” (Hasil wawancara dengan KM, 10 Maret 2017)

Hasil wawancara dengan informan di atas menjelaskan bahwa pemberian bimbingan kepada para peserta didik juga mampu untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki guru.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa”

“Pemberian bimbingan belajar akan mampu meningkatkan hubungan sosial antara guru dan peserta didik. Hal tersebut pasti akan membangun hubungan antara pengajar dan yang diajar, dengan begitu mereka sama-sama mampu untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Jika guru memberikan bimbingan belajar, maka itu sama saja melatih dia untuk selalu menggunakan media pembelajaran yang ada sehingga semakin hari mereka bisa lebih profesional” (Hasil wawancara dengan SH, 2 Februari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemberian bimbingan di luar jam pelajaran adalah tanggung jawab guru, memberikan bimbingan merupakan salah satu dari pekerjaan profesional di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan-informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian bimbingan belajar di luar jam pelajaran akan membuat guru menyesuaikan diri dengan media pembelajaran yang ada, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial yang ada disekitarnya sehingga model inovasi ini akan mampu membantu guru untuk lebih profesional. Pemerintah Kabupaten Gowa dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru membuat inovasi di mana pemberian bimbingan di luar jam pelajaran untuk peserta didik oleh guru sebagai konseler, tentu hal tersebut adalah

hal yang baru yang ada di Kabupaten Gowa.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Gowa

1. Faktor Pendukung Inovasi Pemerintah Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru

a. Pemberian pelatihan guru

Salah satu hal yang menjadi faktor pendukung dalam kebijakan inovasi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Gowa adalah adanya pemberian pelatihan guru. Guru merupakan fasilitator pembelajaran yang perlu dijaga kualitasnya. Namun demikian guru juga memerlukan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan dan perbaikan kualitas. Kesuksesan pendidikan bukan sekedar menghadirkan peserta didik memenuhi kelas di sekolah. Tantangan terberat justru memastikan para peserta didik mendapatkan layanan pendidikan bermutu sehingga mereka mampu mencapai tujuan belajar, menyelesaikan sekolah, dan memiliki kemampuan menghadapi masa depan. Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Seksi Manajemen Pendidikan Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang mengatakan bahwa:

“Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, guru memiliki peran penting dan strategis. Institusi penyelenggara pendidikan membutuhkan guru ideal, berkualitas, terlatih, dan bermotivasi tinggi dalam menjalani profesi dan tanggung jawabnya maka dari itu program pendukung dari pemerintah sangat dibutuhkan dan pemerintah selalu berupaya untuk itu” (Hasil wawancara dengan RN, 11 Februari 2017)

Hasil wawancara di atas maka diketahui bahwa pelatihan guru sangat diperlukan dalam tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Untuk mengetahui tentang gambaran pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Gowa, maka penulis pun melakukan wawancara lebih lanjut dengan Seksi Manajemen Pendidikan:

“Kami di dinas selalu berusaha menghadirkan inovasi yang mendukung pendidikan masyarakat kami, kami keluarkan inovasi yang namanya PBG untuk membantu guru-guru dalam meningkatkan keprofesionalan mereka selama melakukan tugas mengajar. Jadi kalo di kelas mereka mampu untuk menjawab segala keadaan di kelas, mulai dari karakter murid yang berbeda-beda sampai pada persoalan metode belajar-mengajar yang memadai” (Hasil wawancara dengan RN, 19 Februari 2017)

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa mengeluarkan program inovasi peningkatan keprofesionalan guru melalui *Teacher Learning Centre* (Pusat Belajar Guru/PBG). Adapun hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa:

“Memang betul ada pelatihan yang namanya PBG atau Pusat Belajar Guru. Itu diadakan karena tidak dapat dipungkiri masih banyak guru yang terbelakang cara mengajarnya, artinya mereka belum mampu menjalankan tugasnya secara maksimal, terutama guru-guru baru yang belum punya banyak jam mengajar tentu mereka akan kesulitan menyesuaikan diri jika tidak dibimbing” (Hasil wawancara dengan SH, 2 Maret 2017)

Hasil wawancara yang dilakukan penulis diketahui bahwa pemerintah, melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengeluarkan program PBG atau Pusat Belajar Guru dalam rangka untuk mengarahkan para guru dalam meningkatkan keprofesionalan mereka. Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Seksi Manajemen Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa:

“Program ini diharapkan dapat menghasilkan guru-guru inti yang andal yang berkualitas yang akan mengimbaskan kepada guru-guru lainnya di Gowa dan PBG tersebut akan menjadi pusat guru-guru berkualitas” (Hasil wawancara dengan RN, 2 Maret 2017)

Penulispun melakukan wawancara untuk lebih mengetahui tentang gambaran pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa. Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Guru SMPN I Bajeng:

“Dengan adanya PBG ini menjadi wadah untuk menciptakan guru yang mempunyai kompetensi yang lebih, semoga rekrutmennya ke depan dapat lebih sukses dan memenuhi syarat, kriteria dapat menerapkan ilmunya ke guru yang lain” (Hasil wawancara dengan NF, 20 Maret 2017)

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Gowa mengeluarkan program inovasi peningkatan keprofesionalan guru melalui *Teacher Learning Centre* (Pusat Belajar Guru/PBG). PBG dilakukan sebagai salah satu solusi untuk peningkatan mutu dan profesionalisme guru di Kabupaten Gowa. Program tersebut bertujuan untuk membangun sistem pembinaan berkesinambungan dan menyediakan akses belajar yang seluas-luasnya bagi guru dalam rangka pengembangan profesionalisme.

b. Bantuan Sarana dan Prasarana

Faktor lain yang menjadi faktor pendukung terlaksananya inovasi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Gowa adalah bantuan sarana dan prasarana. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis berikut dengan Seksi Manajemen Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa:

“Kami kadang memantau di lapangan ataupun kami juga menerima laporan kalau misalkan ada sekolah yang rusak sebisa mungkin kita bantu. Karena jangan sampai kita tingkatan keprofesionalan guru tetapi sekolah menjadi tempat yang tidak nyaman bagi mereka” (Hasil wawancara dengan RN, 11 Februari 2017)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru maka bantuan sarana dan prasarana diberikan.

Penulispun ingin lebih mengetahui bagaimana gambaran bantuan sarana dan prasarana yang diberikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Gowa. Oleh karena itu

maka penulis pun melakukan wawancara dengan informan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa:

“Bantuan sarana dan prasarana sangat kami prioritaskan dalam kaitannya dengan peningkatan profesionalisme guru untuk meningkatkan mutu pendidikan daerah kami. Contohnya kami memberikan bantuan laptop ataupun komputer. Karena hal itu akan sangat menunjang para guru untuk bisa lebih meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang ada menjadi lebih baik tentunya” (Hasil Wawancara dengan BA, 6 Maret 2017)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa bantuan sarana dan prasarana yang didapatkan bukan hanya untuk menyokong kerja para guru dalam mengajar, namun hal tersebut di maksudkan untuk menunjang proses belajar, di mana proses belajar mengajar tidak hanya melibatkan guru akan tetapi para peserta didik, sehingga apa yang disampaikan oleh guru dapat diserap secara baik oleh para peserta didik. Untuk lebih mengetahui bantuan sarana dan prasarana yang diberikan, penulis melakukan wawancara dengan Guru SD Inpres Ciniayo:

“Iya betul, sekolah kami dapat bantuan. Kami bersyukur karena bantuan tersebut bisa kami pakai di kelas pada saat menjelaskan ataupun kalau ada kegiatan-kegiatan lainnya yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah” (Hasil Wawancara dengan KM, 3 Maret 2017)

2. Faktor Penghambat Inovasi Pemerintah Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru

a. Rendahnya motivasi belajar peserta didik

Salah satu faktor yang menghambat peningkatan

profesionalisme guru adalah rendahnya motivasi belajar peserta didik. Dalam proses belajar mengajar peserta didik adalah subjek utama. Meskipun para guru telah melakukan upaya untuk meningkatkan profesionalisme mereka namun jika para peserta didik memiliki motivasi belajar yang rendah maka hal tersebut akan menghambat kinerja mereka. Penulis pun ingin lebih mengetahui bagaimana rendahnya motivasi belajar peserta didik menjadi faktor penghambat dalam peningkatan profesionalisme guru maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa:

“Kadang guru tidak dapat berbuat banyak jika para peserta didik memiliki motivasi belajar yang rendah. Oleh karena itu, guru dituntut bagaimana mereka mampu menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik dan menyenangkan” (Hasil wawancara dengan SH, 19 Februari 2017)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa motivasi belajar peserta didik dapat mempengaruhi proses inovasi yang dijalankan. Penulis pun melakukan wawancara dengan informan Kepala Sekolah:

“Motivasi belajar peserta didik sangat mempengaruhi berjalannya proses belajar mengajar. Guru tidak akan mampu mengembangkan kompetensinya kalau tidak didukung oleh keadaan sekitarnya terutama suasana kelas yang ada peserta didiknya” (Hasil wawancara dengan RI, 2 Februari 2017)

b. Anggaran

Salah satu masalah yang muncul dari implementasi inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, adalah masalah anggaran. Anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Daerah tersebut masih dianggap kurang, sehingga setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan berhubungan dengan inovasi yang ada terkendala dengan kurangnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Untuk lebih mengetahui akan hal tersebut, penulis pun melakukan wawancara dengan salah satu informan, Seksi Manajemen Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut ini :

“Sampai sekarang kami sulit untuk mengembangkan program-program kami ini, karena masalah anggaran. Dukungan pemerintah Kabupaten Gowa sebenarnya sudah bagus, namun kami harapkan ke depannya agar dalam pembahasan penambahan anggaran dapat diperhitungkan” (Hasil wawancara dengan RN, 20 Februari 2017)

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masalah anggaran merupakan permasalahan yang menjadi penghambat dilaksanakannya inovasi pendidikan dalam peningkatan profesionalisme guru. Penulis juga melakukan wawancara dengan Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa:

“Kalau masalah anggaran memang betul selalu menjadi faktor yang menghambat setiap program. Walaupun program itu sudah jalan, tapi tidak akan sempurna kalau anggaran juga tidak memenuhi” (Hasil wawancara dengan BA, 6 Maret 2017)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa anggaran menjadi faktor penghambat dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Gowa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, pemerintah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Salah hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dilakukan inovasi dalam peningkatan profesionalisme guru. Ada 3 poin penting dalam usaha inovasi tersebut (1) Pemanfaatan media pembelajaran secara efektif. Media pembelajaran yang ada di Gowa sudah berbasis teknologi jadi dituntut untuk mampu menjalankan proses pembelajaran secara efektif. (2) Pembuatan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dimaksudkan untuk memudahkan guru dalam menentukan tema bahan belajar yang akan diberikan guru saat proses belajar mengajar berlangsung (3) Pemberian bimbingan belajar peserta didik, guru dituntut untuk mampu memberikan bimbingan belajar diluar jam pelajaran berlangsung, inovasi tersebut akan memudahkan guru dalam meningkatkan profesionalisme mereka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, dibawah ini beberapa saran atau masukan bagi pemerintah agar kedepannya lebih

69

guru.

2. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan permasalahan anggaran. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam inovasi pendidikan masih rendah. Oleh karena itu agar program inovasi yang ada bisa berjalan dengan maksimal, maka anggaran dalam pendidikan perlu ditambah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana, Armida S. 2000. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan*.
- Arikunto Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Bafadal, Ibrahim. 2003. *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Damin, Sudarwan. 2002. *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice-Hall.
- Fatah, N. 2000. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Andira.
- Fisipol Unismuh, *Pedoman Proposal Penelitian dan Skripsi*, Badan Penerbit Unismuh Makassar.
- Hamijoyo, Santoso S. 1999. *Pola Otonomi Daerah yang Efektif dan Efisien Untuk Diimplementasikan dalam Bidang Pendidikan*, Malang: FIP UNM.
- H.A.R Tilaar. 2011. *Manajemen Pendidikan Nasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Persada.
- Hendro. 2011. *Dasar-dasar Kewirausahaan*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Ihsan Fuad. 2010. *Dasar-dasar Kependidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Irianto Bahtiar Yoyon. 2012. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Balai Pustaka.
- Miller, D. 1981. *Toward A New Contingency Perspective: The Search for Organizational Gestals*, New York: Quartelly Press.
- Muhammad Munadi & Barnawi. 2011. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nanang Fattah. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rogers Everett & Shoemaker Floyd. F. 1981. *Memasyarakatkan Ide-Ide baru*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Sanusi Achmad. 2014. *Strategi Pendidikan*, Bandung: Nuansa Cendikia.
- Saroni Mohammad. 2013. *Pendidikan Untuk Orang Miskin*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Suharsaputra Uhar. 2013. *Administrasi Pendidikan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Supriadi, D. 1999. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Syah, Muhibbin. 1995. *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Medpress.

Zainur Rozikin, Muhammad. 2007. *Moral Pendidikan di Era Global*, Malang: Averroes Press.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa.

UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

RIWAYAT HIDUP



HUSNUL ISTIQAMAH, Lahir di Limbung pada Tanggal 19 November 1993 dan merupakan anak ke empat dari Mohammad Syarif dan Bintoenng. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri Limbung Puteri dan Sekolah Menengah Pertama di MTs Muhammadiyah Limbung. Penulis menamatkan diri di SMK Negeri I Limbung Kabupaten Gowa. Penulispun melanjutkan pendidikannya ke jenjang Strata satu (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2012 dan menyelesaikan studinya pada tahun 2017.